

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI,  
PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN  
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA  
(STUDI EMPIRIS PADA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN  
MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO)**

**Anam Masruhin, M. Elfan Kaukab**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah

Email : masruhinanam9@gmail.com

---

**ABSTRAK**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa. Populasi yang digunakan dalam studi ini adalah 16 desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Sampel dalam studi ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kepala urusan keuangan), dan kepala urusan sebanyak 80 sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu diperoleh bahwa nilai adjusted R square adalah 93,9%. Ini berarti pengelolaan dana desa dapat diprediksi dari variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran. Sedangkan 6,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Kata Kunci :** Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Kejelasan Sasaran Anggaran.

---

**ABSTRACT**

---

*This study aims to determine the effect of apparatus competencies, organizational commitment, community participation, and clarity of the budget target for managing village funds in the Village Devices in Mojotengah District, Wonosobo Regency.*

*The data used in this study are primary data and analyzed using multiple linear regression analysis to determine the effect of apparatus competencies, organizational commitment, community participation, and clarity of budget targets for managing village funds. The population used in this study was 16 villages in Mojotengah District, Wonosobo Regency. The samples in this study were the village head, village secretary, village treasurer (head of financial affairs), and 80 business heads.*

*The results of this study indicate that apparatus competency variables, organizational commitment, community participation, and clarity of budget targets have a positive effect on village fund management. In addition, it was found that the adjusted R square value was 93.9%. This means that management of village funds can be predicted from apparatus competency variables, organizational commitment, community participation, and clarity of budget goals. While 6.1% is influenced by other variables.*

**Keywords :** Management of village funds, competency apparatus, organizational commitments, community participation, clarity of the budget target

---

## 1. PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Larastika Medianti (2018) pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa (DD) sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (2018) pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebesar Rp 187,75 Triliun. Dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.

Penerima dana desa terbesar pada tahun tersebut yaitu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 6.384.442.058.000 (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dana desa yang digelontorkan pada tahun anggaran 2018 oleh pemerintah pusat sama dengan tahun 2017 atau sebesar Rp 60 triliun. Dana desa terbesar masih tetap yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah dana desa lebih dari 4 triliun. Kucuran dana desa di Jawa Tengah pada mencapai Rp 6,74 triliun dan di Jawa Timur mencapai 6,36 triliun, atau naik dibanding tahun 2017 (<https://www.beritasatu.com>). Sejumlah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mendapat suntikan dana dari pusat sebagai dana desa cukup besar, salah satunya Kabupaten Wonosobo yang mendapat dana desa sebesar

Rp 184.100.308.000 pada TA 2018. Jumlah dana desa yang cukup besar menjadi pertanyaan besar apakah desa siap dalam mengelola keuangan desa secara baik dan tepat sasaran. Melihat kapasitas dari pemerintah desa yang masih cukup lemah dalam pengelolaan keuangan desa (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2018).

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan wawancara dengan bapak Priyono kasi pemerintah di Kecamatan Mojotengah. Dan hasil dari wawancara tersebut memperlihatkan kondisi masih lemahnya pemahaman aparatur desa tentang laporan keuangan yang menyebabkan terlambatnya pelaporan keuangan desa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan aparatur desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa agar menjadi semakin akuntabel dan transparan (Kementerian Keuangan RI, 2016). Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga semester 1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (<https://nasional.kompas.com>).

Oleh sebab itu, diperlukan kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa (Larastika Medianti, 2018). Selain itu sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, aparat pemerintah desa yang terkait harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. (Ika Sasti Ferina dkk, 2016). Menurut Rudana (2005) kompetensi merujuk pada pengetahuan (knowledge), keahlian (skills) dan kemampuan (abilities), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu.

Komitmen organisasi sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada satu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Robbins dan Judge, 2008). Menurut Khikmah (2005) komitmen organisasi juga dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi.

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula (Larastika Medianti 2018).

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (Kenis, 1979) dalam (Bangun, 2009). Adanya sasaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidak jelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (Putra, 2013).

Dari paparan teori dan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya pengelolaan dana desa di Kecamatan

Mojotengah sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan. Peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan apakah kompetensi aparat, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah masih lemahnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Mojotengah sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan, maka pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Apakah kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa ?
- Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa ?
- Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa ?
- Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa ?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- Untuk membuktikan pengaruh kompetensi aparat terhadap pengelolaan dana desa
- Untuk membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa
- Untuk membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa
- Untuk membuktikan pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi praktis bagi pihak perangkat desa sebagai masukan dalam meningkatkan kompetensi, komitmen, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran dalam pengelolaan dana desa khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharsimi Arikunta (1988) pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah suatu cara atau proses mengatur keuangan dana desa yang diberikan pemerintah dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Menurut Larastika Medianti (2018) Dalam pengelolaan dana desa diperlukan aspek kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan Partisipasi masyarakat yang tinggi agar akuntabel dan transparan.

### **Kompetensi Aparatur**

Menurut Moeheriono (2009) Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode waktu periode tertentu. Menurut Kravetz (2004) kompetensi adalah sesuatu yang seseorang tunjukan dalam kerja setiap hari. Fokusnya adalah pada perilaku di tempat kerja, bukan sifat-sifat kepribadian atau ketrampilan dasar yang ada di luar tempat kerja ataupun di dalam tempat kerja. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata (BKN, 2003). Menurut Spencer (1993) penetapan standar kompetensi meliputi enam kelompok kompetensi, yaitu:

a. Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan (motivasi untuk

berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas, ketelitian, kualitas kerja, proaktif, dan kemampuan mencari dan menggunakan informasi).

- b. Kemampuan melayani (empati, berorientasi pada pelanggan).
- c. Kemampuan memimpin (kemampuan mempengaruhi, kesadaran berorganisasi, kemampuan membangun hubungan).
- d. Kemampuan mengelola (kemampuan mengembangkan orang lain, kemampuan mengarahkan, kemampuan kerjasama kelompok, kemampuan memimpin kelompok).
- e. Kemampuan berfikir (berpikir analitis, berpikir konseptual, keahlian teknis/professional/manajerial).
- f. Kemampuan bersikap dewasa (kemampuan mengendalikan diri, fleksibilitas, komitmen terhadap organisasi).

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Komitemen yang kuat akan memungkinkan seseorang mampu mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen, pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan (Simanjuntak, 2005). Menurut Griffin (2004) komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana sikap individu atau pegawai mengenal dan terkait pada organisasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah kemampuan pada karyawan dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, tujuan organisasi atau perusahaan, mencakup unsur loyalitas terhadap perusahaan, dan keterlibatan dalam pekerjaan (Romandhon, 2017). Menurut Allen & Mayer (1993) dalam Eva Kris (2009) mengemukakan bahwa ada tiga komponen komitmen organisasi, yaitu :

- a. *Affective commitment* (komitmen afektif) terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional.
- b. *Continuance commitment* (komitmen kontinyu) yaitu perasaan berat meninggalkan organisasi dikarenakan

kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasinya di organisasi tersebut.

- c. *Normative commitment* (komitmen normatif) adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang di dasarkan atas pertimbangan norma, nilai, dan keyakinan karyawan.

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dalam proses yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007). Menurut Sugiyono (2004) partisipasi merupakan ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Monique Sumampouw (2004) Adapun prinsip-prinsip partisipasi yaitu :

- Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap individu mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa.
- Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses

pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

- Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai individu tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap individu itu sendiri, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

### Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menterjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi (Ramandei, 2009). Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut.

Menurut Locke dan Lathan (1984) dalam Putra (2013) agar pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan:

- Tujuan, membuat secara terperinci umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
- Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur.
- Standar, menentukan standar/target yang dicapai.
- Jangka waktu, menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
- Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
- Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
- Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pada 16 desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive random sampling adalah model yang dipilih dalam penelitian ini, jenis metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dan pilihan-pilihan tertentu yang ingin didapatkan oleh peneliti (Maulidi, 2018). Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 5 aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur keuangan), dan unsur kaur, dengan jumlah sampel adalah 80 responden.

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, penelitian ini merupakan studi lapangan dengan intervensi minimal. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang bersumber dari jawaban responden atas pernyataan yang berhubungan dengan kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa.

#### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket (kuesioner) dengan cara mendatangi responden secara langsung. Dengan mendatangi responden secara langsung diharapkan tingkat *response rate* akan tinggi.

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

##### Pengelolaan Dana Desa (Y)

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Zeyn (2011) dalam Khaeril Wahyu Perdana (2018), yaitu perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan,

melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporan keuangan. Terdiri dari 15 pernyataan dengan 5 point skala likert. Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat Setuju.

##### Kompetensi Aparatur (X1)

Menurut Rudana (2005) kompetensi merujuk pada pengetahuan (knowledge), keahlian (skills) dan kemampuan (abilities), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Marly Helena AK (2009) dalam Larastika Medianti (2018), yaitu pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill), dan sikap (attitude). Terdiri dari 13 pernyataan dengan 5 point skala likert. Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat Setuju.

##### Komitmen Organisasi (X2)

Komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang mampu mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen, pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan (Simanjuntak, 2005). Indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Zela Prabawaning Tyas (2013), yaitu komitmen afektif (affective commitment), komitmen berkelanjutan (continuance commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). Terdiri dari 9 pernyataan dengan 5 point skala likert. Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat Setuju.

##### Partisipasi Masyarakat (X3)

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dalam proses yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007).

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Sujarweni (2015), yaitu terlibat dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Terdiri dari 9 pernyataan dengan 5 point skala likert. Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat Setuju.

#### Kejelasan Sasaran Anggaran (X4)

Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Putra (2013), yaitu kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, koordinasi. Terdiri dari 9 pernyataan dengan 5 point skala likert. Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat Setuju.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat digunakan tabel statistik deskriptif mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Deskriptif Statistik Variabel-Variabel Penelitian**

	Std. deviat ion	Rata-rata aktual	Kisaran aktual	Kisar an teoritis	Rata-rata teoritis
Kompetensi Aparatur	5,744	57,85	48-65	13-65	39
Komitmen Organisasi	3,734	39,90	30-45	9-45	27
Partisipasi Masyarakat	3,257	40,15	33-45	9-45	27
Kejelasan Sasaran Anggaran	3,458	40,49	33-45	9-45	27
Pengelolaan Dana Desa	5,586	66,90	57-75	15-75	45

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil pengujian statistik menjelaskan bahwa pada variabel kompetensi aparatur kisaran aktual jawaban kompetensi aparatur desa 48 sampai 65, kisaran teoritis 13 sampai 65, rata-rata aktual 57,85 dan standar deviasi 5,744 sedangkan rata-rata teoritisnya 39. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat desa yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki kompetensi yang baik. Komitmen organisai kisaran aktual jawaban komitmen organisasi 30 sampai 45, kisaran teoritis 9 sampai 45, rata-rata aktual 39,90 dan standar deviasi 3,734 sedangkan rata-rata teoritisnya 27. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat desa yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki komitmen organisasi yang baik. Partisipasi masyarakat kisaran aktual jawaban partisipasi masyarakat 33 sampai 45, kisaran teoritis 9 sampai 45, rata-rata aktual 40,15 dan standar deviasi 3,257 sedangkan rata-rata teoritisnya 27. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam penelitian ini memiliki partisipasi masyarakat yang baik. Kejelasan sasaran anggaran kisaran aktual jawaban kejelasan sasaran anggaran desa 33 sampai 45, kisaran teoritis 9 sampai 45, rata-rata aktual 40,49 dan standar deviasi 3,458 sedangkan rata-rata teoritisnya 27. Karena rata-rata aktual lebih tinggi dari rata-rata teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran desa dalam penelitian ini memiliki kejelasan sasaran yang jelas.

#### Uji Ketepatan Model

Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Ketepatan Model**

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	1969,610	492,402	257,076	,000 <sup>b</sup>
Residual Total	120,670	1,915		
	2090,279			

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yaitu  $257,076 > 3.99$  dengan tingkat signifikan di

bawah 0,05 yaitu 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran sudah sesuai atau Fit sehingga secara bersama-sama dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa.

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Uji Validitas**

Variabel	Kisaran korelasi	Signifikan	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,468** -0,852**	0,000	Valid
Komitmen Organisasi	0,564** -0,784**	0,000	Valid
Partisipasi Masyarakat	0,481** -0,794**	0,000	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,474** -0,823**	0,000	Valid
Pengelolaan Dana Desa	0,448** -0,736**	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan 3 di atas menjelaskan bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki kisaran korelasi antara 0,468 sampai 0,852 dan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan kompetensi aparatur yang mengukur variabel kompetensi aparatur dinyatakan valid. Variabel komitmen organisasi memiliki kisaran korelasi 0,564 sampai 0,784 dan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini

menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tentang komitmen organisasi yang mengukur variabel komitmen organisasi dinyatakan valid. Variabel partisipasi masyarakat memiliki kisaran korelasi 0,481 sampai 0,794 dan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan pernyataan-pernyataan tentang partisipasi masyarakat yang mengukur variabel partisipasi masyarakat dinyatakan valid. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki kisaran korelasi 0,474 sampai 0,823 dan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan pernyataan-pernyataan tentang kejelasan sasaran anggaran yang mengukur

variabel kejelasan sasaran anggaran dinyatakan valid. Variabel pengelolaan dana desa memiliki kisaran korelasi 0,448 sampai 0,736 dan signifikan pada tingkat 0,000. Hal ini menunjukkan pernyataan-pernyataan tentang pengelolaan dana desa yang mengukur variabel pengelolaan dana desa dinyatakan valid.

#### Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha based on standardized item ( $\alpha$ )	Batas Alpha ( $\alpha$ )	Keterangan
Kompetensi aparatur	0,931	0,6	Reliabel
Komitmen organisasi	0,852	0,6	Reliabel
Partisipasi masyarakat	0,811	0,6	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,858	0,6	Reliabel
Pengelolaan dana desa	0,903	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2019

Secara keseluruhan uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat dari nilai cronbrach alpha yang lebih besar dari nilai batas cronbrach alpha sebesar 0,6. Sehingga seluruh pernyataan yang berkaitan dengan variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran pada pengelolaan dana desa adalah reliabel.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

**Tabel 5. Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	68
Normal Parameters	Mean
	Std. Deviation
	1,34202932
Most Extreme Differences	Absolute
	Positive
	Negative
	,049
	,049
	-,045



Test Statistic	,049
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil pengujian statistik menjelaskan bahwa hasil perhitungan normalitas dengan menggunakan uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* memiliki probabilitas tingkat signifikan di atas  $\alpha = 0,05$  yaitu 0,200. Hal ini berarti dalam model regresi terdapat variabel residual atau variabel pengganggu yang terdistribusikan secara normal.

**Uji Multikolonieritas**

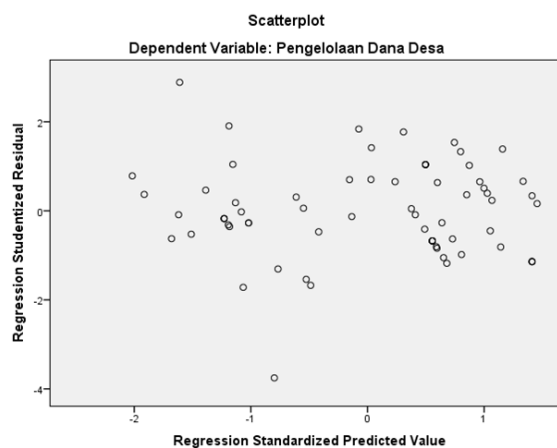
**Tabel 6 Uji Multikolonieritas**

Variabel	Toleran	VIF	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,341	2,935	Tidak multikoloni eritas
Komitmen Organisasi	0,266	3,766	Tidak multikoloni eritas
Partisipasi Masyarakat	0,265	3,779	Tidak multikoloni eritas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,315	3,174	Tidak multikoloni eritas

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,1. Selanjutnya hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hasil yang sama yaitu semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

**Heterokedastisitas**



**Gambar 1. Uji Heterokedastisitas**

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas.

**Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis linier berganda dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Error	Beta	T	Sig.
	B	Standardized Coefficients				
(Constant)	1,055		2,195		,481	,632
Kompetensi Aparatur	,185		,050	,190	3,669	,001
Komitmen Organisasi	,703		,088	,470	7,998	,000
Partisipasi Masyarakat	,456		,101	,266	4,517	,000
Kejelasan Sasaran Anggaran	,217		,087	,134	2,493	,015

Berdasarkan tabel coefficients di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  
 $Y = 1,055 + 0,185X_1 + 0,703X_2 + 0,456X_3 + 0,217X_4 + 1,384$

Persamaan regresi di atas memiliki persamaan sebagai berikut:  
 Nilai ( $\alpha$ ) konstan sebesar 1,055 (bernilai positif) menunjukkan bahwa tanpa dipengaruhi variabel

independen, yaitu variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat, perangkat desa memiliki tingkat pengelolaan dana desa yang baik.

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur bernilai positif, yaitu sebesar 0,185 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pada desa di Kecamatan Mojotengah dalam pengelolaan dana desa sudah baik, dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikan 0,000, karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa diterima.

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi bernilai positif, yaitu sebesar 0,703 menunjukkan bahwa komitmen organisasi pada desa di Kecamatan Mojotengah dalam pengelolaan dana desa sudah baik, dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikan 0,000, karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka H3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa diterima.

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat bernilai positif, yaitu sebesar 0,456 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada desa di Kecamatan Mojotengah dalam pengelolaan dana desa sudah baik, dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikan 0,000, karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka H3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa diterima.

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran bernilai positif, yaitu sebesar 0,217 menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran pada desa di Kecamatan Mojotengah dalam pengelolaan dana desa sudah jelas, dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikan 0,000, karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 maka H4 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa diterima.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 8

Uji Determinasi				
R	Squ	Adjusted	Std. Error	
R	are	R Square	of the	Durbin-
			Estimate	Watson
,971	,942	,939	1,384	1,881

Sumber: data primer diolah, 2019

Tabel 8 menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,939 atau 93,9%, hal ini menunjukkan bahwa variabel pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran sebesar 93,9%, sedangkan sisanya sebesar 6,1% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa diterima. Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan tugas yang diembannya akan selalu mendorong pegawai untuk bekerja dengan efektif, efisien dan produktif. Pegawai yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Larastika Medianti (2018) serta penelitian Sarifudin Mada dkk (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

#### Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa diterima. Artinya semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena sebuah organisasi yang individunya memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik demi mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifudin Mada dkk (2018)

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa diterima. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaeril Wahyu Perdana (2018), Sarifudin Mada dkk (2018) dan Larastika Medianti (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa diterima. Artinya semakin jelas sasaran anggaran maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena bahwa dengan sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh N.L Supadmi dan D.G Dharma Saputra (2018), I Nyoman Judarmita dan Ni Luh Supadmi (2017), dan I Made Agus Suma Arta dan Ni Ketut Rasmini (2019) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

## **5. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil pengujian statistik tentang kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kompetensi aparatur mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (H1 diterima). Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal ini dikarenakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, mempunyai keterampilan, dan sikap yang baik akan selalu bekerja dengan efektif, efisien dan produktif sehingga kinerja pengelolaan dana desa akan meningkat.
- b. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (H2 diterima). Artinya komitmen organisasi yang tinggi akan mendorong terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini dikarenakan apabila seorang aparatur memiliki rasa memiliki dalam organisasinya dia akan bekerja dengan giat untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri untuk organisasi tersebut dengan baik. Sehingga akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel.
- c. Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (H3 diterima). Artinya semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya.
- d. Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (H4 diterima). Artinya semakin jelas sasaran anggaran maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Karena bahwa dengan sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, perangkat desa untuk lebih terampil, aktif dan cerdas dalam mencari informasi tentang dana desa serta giat dalam mengikuti seminar dan pelatihan tentang dana desa yang diadakan

pihak terkait agar memahami proses dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan. Masyarakat juga hendaknya selalu memberikan pengawasan supaya tidak terjadi penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

#### **Keterbatasan**

- a. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada objek penelitian di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan di lingkungan lain.
- b. Penelitian ini hanya meneliti tentang perangkat desa yang ada di desa-desa pada Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, hasilnya bisa berbeda apabila meneliti pada populasi lain.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Keuangan Nasional Republik Indonesia Tahun 2003.
- Bangun, Andarias. 2009. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi*. Tesis. Universitas Sumatra Utara.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017
- Devi, Eva Kris Diana. 2009. *Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Intervening (Studi pada Karyawan Outsourcing PT. Semeru Karya Buana Semarang)*. Semarang. Tesis. Program Pascasarjana UNDIP.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017
- Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, dan Herman Lubis. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hilir)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.4 No. 3.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Griffin. 2004. *Komitmen Organisasi*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- H.A.R. Tilaar (2009) *Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal SNA XI Pontianak.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Kebijakan Pengalokasian dan Penyeluran Dana Desa Tahun 2017. Disampaikan pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Redtop Hotel and Convention Centre. 2124 November 2016.
- Khikmah, Siti Noor. 2005. *Pengaruh Profesionaliasme Terhadap Keinginan Berpindah Dengan Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Maksi Undip, Vol. 5 Agustus.
- Kravetz. 2004. *Human Resource Management*. McGraw-Hill, Boston.
- Maulidi, R. (2018) "ANALISIS KEBERHASILAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA STUDI EMPIRIS PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNSIQ WONOSOBO", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 5(1), pp. 72-81. doi: <https://doi.org/10.32699/ppkm.v5i1.451>.
- Medianti, Larastika. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Bintan)*. Jurnal Ekonomi. Universitas Riau.

- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Prof.Dr.Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ramandei. 2009. *Pengaruh karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)*. Jurnal. UNDIP.
- Robbins, Stephen P, dan Timothy A Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 2 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romandhon, R. (2017) “ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KOMITMEN PROFESIONAL, KOMITMEN, ORGANISASI, DAN ORIENTASI ETIKA TERHADAP SENSITIVITAS ETIS AUDITOR (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sains Alqur-an Wonosobo).”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 4(1), pp. 56-63
- Rudana, N. 2005. *Pengaruh Komptensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar*. Jurnal Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Santoso, Hendry. 2018. *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa*. Skripsi Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Spencer, M.L. & Spencer, M.S. 1993. *Competence at work models for superior performance*. John Willy & Son: New York, USA.
- Suharsimi, Arikunta. 1988. *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*. CV. Rajawali. Jakarta. 8.
- Suhartono, E, dan Solichin, M. 2006. *Pengaruh Kejelasan Anggaran, Terhadap Senjangan anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi 9.
- Sutrawati, Kadek. 2016. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*. Skripsi. Universitas Halu Oleo: Kendari.
- Tyas, Zela Prabawaning. 2013. *Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Sumenep) Tahun 2013*. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.  
<https://nasional.kompas.com>.  
<https://www.beritasatu.com>.